

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Berenschot, W dan Klinken, G. V. (2019). *Citizenship In Indonesia: Perjuangan Atas Hak, Identitas, dan Partisipasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin., Mikdar, M., Sardjijo. (2018). *Ilmu Kewarganegaraan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Fahmi, K. (2021). *Hak Pilih dalam Pemilihan Umum*. Depok: Rajawali Pers.
- Hiariej, E. dan Stokke, K. (2018). *Politic of Citizenship in Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hikam, M. A. S. (1999). *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno. (2013). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal:

- Abdullah, R. H. (2015). *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. *Fiat Justisia: jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Bawamenewi, A. (2019). *Implementasi Hak Politik Warga Negara*. *Jurnal Warta Edisi*.
- Efyanti, Y. (2019). *Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung Di Indonesia Perspektif Sosiologis Dan Hukum Islam*. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 17(2).

- Hadipurwoko, H., Darmawan, W. B., Herdiansyah, A. G. (2020). *Jaminan Hak Pilih Bagi Narapidana Pada Pemilu 2019 Studi Kasus: Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora, 4(2), 131-142.
- Hasanah, H. (2017). *Teknik-Teknik Observasi (Studi Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*. Jurnal at-Taqaddum, 8(1).
- Hertanto, H. dan Handi. M. (2020). *Pemenuhan Hak Pilih Narapidana pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung*. Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya.
- Leilani, I. (2021). *Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling*. Historis: Jurnal Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Pendidikan Sejarah.
- Maula, I. F., dan Ubaidullah, M. A. (2020). *Hak Politik Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh pada Pemilu Tahun 2019*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 5(1).
- Nurahma, G.A., dan Hendriani, W. (2021). *Tinjauan Sistematis Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif*. Mediapsi, 7(2), 119-129.
- Partono. (2020). *Evaluasi Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal KPU.
- Setiarsih, A. (2017). *Diskursus Pendidikan Kritis (Critical Pedagogy) dalam Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 5(2).

Skripsi dan Disertasi:

- Rahmah, S. (2024). *Pemenuhan Hak Pilih Narapidana Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 di Lapas Kelas IIB Banjar Kecamatan Pataruman*. (Skripsi Sarjana, Universitas Siliwangi).
- Samsuri. (2010). *Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia (Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Reformasi)*. Disertasi. Bandung: SPs UPI.

Sumber Konstitusional:

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).
10 Desember 1948. Pasal 21.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*

_____, *Undang-Undang Dasar 1945.* Pasal 27 ayat (1).

_____, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Pasal 1 ayat (2).

_____, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,* Pasal 3.

_____, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).*

_____, *Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.* Pasal 43 ayat (1) – (3).

_____, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*

Internet:

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Hak Politik Warga Negara (Sebuah

Perbandingan Konstitusi)”. Melalui <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id>.
(Diakses pada 18 November 2023).

KBBI Daring. 2016. Entri “berjuang”. Diakses 28 Mei 2024.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berjuang>.

Maksum, R. (2023). “Hak Asasi Manusia di Bidang Politik: Menegakkan Kebebasan dan Kepastian Hukum”. Melalui <https://fahum.umsu.ac.id/hak-asasi-manusia-di-bidang-politik-menegakkan-kebebasan-dan-kepastian-hukum/>. (Diakses pada 18 November 2023).